

JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER

Vol. 3, No. 2, Juli 2011

ISSN : 2085 - 1189

**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Ditinjau Dari *Fiscal Knowledge*, *Locus Of Control*,
Dan Interaksi Antara *Fiscal Knowledge* Dengan *Locus Of Control***
Ika Fransisca

**Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Dan Struktur Dewan Komisaris
Terhadap Kinerja Perusahaan**
Cyrillius Martono dan Siprianus Salvatore Sina

**Pengaruh Profesionalisme Auditor
Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pada Kantor Akuntan Publik
Di Surabaya**
Sofian dan Lindrawati

**Pengaruh *Investment Opportunity Set* Dan Mekanisme *Corporate Governance*
Terhadap Kualitas Laba**
Reynard Xaverius Talatas dan Shanti

**Analisis Kinerja Perusahaan
Dan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Berlakunya UU PPh Tahun 2008**
Ronny Irawan

DAFTAR ISI

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari <i>Fiscal Knowledge</i> , <i>Locus Of Control</i> , Dan Interaksi Antara <i>Fiscal Knowledge</i> Dengan <i>Locus Of Control</i> Ika Fransisca	107
Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Dan Struktur Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan Cyrillius Martono dan Siprianus Salvatore Sina.....	133
Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya Sofian dan Lindrawati.....	151
Pengaruh <i>Investment Opportunity Set</i> Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Laba Reynard Xaverius Talatas dan Shanti.....	177
Analisis Kinerja Perusahaan Dan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Berlakunya UU PPh Tahun 2008 Ronny Irawan	197

**PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL
AKUNTANSI KONTEMPORER**

KEBIJAKAN PENULISAN

Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO) diterbitkan oleh Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dua kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyalurkan minat berbagi pengetahuan bagi para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan para pemerhati ilmu pengetahuan. Redaksi menerima artikel konseptual maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan ilmu akuntansi dan terapannya.

Artikel yang akan dimuat harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah diterima dari penulis, artikel memasuki tahap seleksi oleh tim redaksi dengan *blind review*. Kriteria seleksi meliputi kesesuaian penulisan dengan format penulisan baku publikasi Jurnal Akuntansi Kontemporer/JAKO (gaya selingkung), kelayakan topik/bahasan, relevansi metode riset yang digunakan, signifikansi kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan profesi yang berkaitan dengan ilmu Akuntansi dan terapannya, serta kekinian rujukan. *Review* terhadap artikel juga dapat melibatkan mitra bestari – seorang pakar yang independen dari redaksi. Penyunting berhak menyeleksi dan memberikan telaah konstruktif, dan menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dapat ditujukan secara elektronik maupun *hardcopy* ke:

Alamat Redaksi dan Penerbit:

Redaksi Jurnal Akuntansi Kontemporer
Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala
Jl. Dinoyo no. 42-44, Surabaya
(pengiriman artikel: u.p. Agustina Karin)
Telp. (031) 5678478 ext. 122, Fax (031), 5682211 ext. 143
Email: jako_uwm@yahoo.co.id

FORMAT PENULISAN

1. Artikel berupa penelitian atau pemikiran dengan cakupan ilmu akuntansi dan terapannya, yang belum dipublikasikan pada media cetak manapun.
2. Rerangka artikel terdiri dari:

Artikel Penelitian	Artikel Konseptual
a. Judul	a. Judul
b. Nama dan institusi penulis	b. Nama dan institusi penulis
c. Abstrak	c. Abstrak
d. Bagian pendahuluan	d. Bagian pendahuluan
e. Rerangka Teori dan Hipotesis (jika ada)	e. Bagian inti atau pembahasan
f. Metode penelitian	f. Penutup atau simpulan

g. Hasil penelitian	g. Daftar rujukan (yang dirujuk dalam uraian saja/artikel)
h. Pembahasan	
i. Simpulan, Implikasi, dan Keterbatasan	
j. Daftar rujukan (yang dirujuk dalam uraian saja/artikel)	

Penjelasan untuk masing-masing sub dalam rerangka artikel adalah sebagai berikut:

a. Judul

Judul harus menggambarkan hasil penelitian dan variabel-variabel, serta hubungan antara variabel tersebut bisa dilihat dalam judul tersebut. Judul tidak lebih dari 14 kata berbahasa Indonesia atau 10 kata berbahasa Inggris.

b. Abstrak

- 1) Bagian ini memuat ringkasan artikel dan berisi ide-ide pokok yang membuat pembaca tertarik dan berminat untuk membacanya misalnya masalah, tujuan penelitian, metode, temuan dan implikasi.
- 2) Disusun dalam 1 (satu) paragraf.
- 3) Disajikan di bagian awal di atas dengan font *Times New Roman* 11 dan cetak miring (*Italics*).
- 4) Terdiri dari 50 sampai 100 kata.
- 5) Ditulis dalam Bahasa Inggris, baik artikel berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris.
- 6) Mencantumkan kata kunci (*keywords*) disebutkan di bawah paragraf abstrak sebanyak 2 - 5 kata yang sangat khusus dan sering dipakai dalam artikel.

c. Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang, alasan penelitian, rumusan masalah, pernyataan tujuan, dan organisasi penulisan. Adapun penulisannya tidak memakai sub judul (*sub-heading*).

d. Rerangka Teori yang Dipakai dan Hipotesis (jika ada)

Bagian ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian dan alur berpikir ilmiah dalam mengembangkan hipotesis. Apabila ada model penelitian, maka harus dicantumkan di sini.

e. Metode Penelitian

Bagian ini memuat cara penulis dalam melakukan penelitian, disajikan secara lengkap namun padat, mulai dari metode pengambilan sampel sampai dengan teknik analisis.

f. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data dan pembahasan diungkapkan dengan padat dan jelas, bukan merupakan barisan tabel data.

g. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Bagian ini merupakan penutup artikel. Simpulan ditulis tanpa nomor, dan disajikan dalam bentuk paragraf. Implikasi dan keterbatasan penelitian juga disajikan dalam bentuk paragraf.

h. Daftar Rujukan

Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus disajikan dalam bagian ini konsisten dengan tulisan, gambar, atau tabel yang dikutip. Cara penulisan daftar rujukan konsisten dengan kutipan di dalam artikel.

i. Lampiran

Lampiran dapat berisi instrumen penelitian, data pendukung, gambar dan sebagainya, yang mendukung kelengkapan artikel dan memudahkan para pembacanya untuk memahami isi tulisan.

3. Artikel diketik pada kertas A4.
4. Judul artikel diketik di tengah dengan huruf besar semua, cetak tegak tebal, dan tanpa tanda kutip. Tulisan judul dengan *Times New Roman* ukuran font 14.
5. Identitas penulis yaitu nama (tanpa gelar dan jabatan), lembaga beralamat serta alamat *email* dicantumkan di bawah judul. Identitas diketik di tengah dengan huruf besar-kecil dan cetak tebal.

Contoh: Agustinus W. Budiman

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

agus_budiman@yahoo.com

6. Panjang artikel tidak lebih dari 7.000 kata atau 15 - 25 halaman berspasi 1 (satu).
7. Jenis huruf *Times New Roman* 12.
8. Margin kiri dan atas 4 cm, sedangkan margin kanan dan bawah 3 cm. Isi naskah diketik secara konsisten dengan format *justify*.
9. Kutipan ditulis dengan menggunakan menggunakan sistem *in text referencing* dengan menyebutkan nama akhir penulis, tahun, dan halaman (untuk buku).
Contoh: Teori entitas yang dibahas dalam Suwardjono (2005) mencakup
10. Minimal 60% dari rujukan yang digunakan berasal dari sumber yang *up to date* (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun sebelum karya ilmiah disampaikan ke JAKO) dan berupa jurnal baik konseptual maupun hasil penelitian.
11. Mencantumkan nomor urut halaman di bagian bawah tengah.
12. Gambar harus diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi dan sumber kutipan. Urutan tampilan: (1) Nomor, (2) Judul, (3) Isi, dan (4) Sumber kutipan gambar. Tulisan gambar diketik di tengah bawah dengan huruf besar-kecil dan cetak tebal.
13. Kata dalam bahasa asing yang belum diubah menjadi bahasa Indonesia atau belum menjadi istilah teknis, diketik dengan menggunakan huruf *Italics*. Penggunaan singkatan sebaiknya dihindari, sedangkan penggunaan istilah teknis yang spesifik dapat dilakukan jika pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan. Bahasa Indonesia menggunakan istilah baku dan bahasa yang baik dan benar. Contoh: *training* menjadi pelatihan.
14. Penyerahan naskah berupa *softcopy* dalam program MS Word dalam 1 (satu) CD dan 3 (tiga) *hardcopy*. *Hardcopy* dicetak tanpa diberi identitas penulis.
15. Melampirkan CV penulis di lembar terpisah. CV memuat: nama, alamat rumah dan institusi, nomor telpon yang dapat dihubungi dan nomor telpon institusi, riwayat pendidikan, beberapa judul karya ilmiah dan/atau penelitian terbaru, bidang keahlian/bidang minat penelitian, serta pengalaman kerja dan organisasi.
16. Kepastian pemuatan atau penolakan artikel akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat akan menjadi milik redaksi, kecuali atas permintaan penulis.
17. Penulisan daftar rujukan mengikuti format berikut:

a. Dari Buku oleh Satu Pengarang

Riyanto, B. 1984. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.

Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

b. Dari Buku oleh Dua Pengarang

Cooper, D.R., dan P.S. Schinedler. 2001. *Business Research Methods*. 7th Edition. Singapore: McGraw-Hill & Irwin.

c. Dari Buku oleh Tiga Pengarang atau Lebih

Rekso, S. *et al.* 1980. *Business Forecasting*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.

d. Dari Buku oleh Pengarang yang Sama

- Van Horne, J. C. 1986. *Financial Management and Policy*. Ninth Edition. New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
- _____. 1990. *Fundamentals of Financial Management*. Sixth Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- e. **Dari Buku tanpa pengarang**
Author's Guide. 1975. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. *Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*. Penerbit Handayani. 1992.
 - f. **Buku oleh Lembaga, Pemerintah dan Organisasi Lain**
 R.I., Majelis Musyawarah Rakyat Sementara. 1966. *Hasil-hasil Sidang Umum ke IV Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Penerangan R.I.
 - g. **Surat Kabar**
 - a. Artikel tanpa nama penulis
Kompas (Jakarta), 28 Pebruari 1995.
 - b. Artikel dengan judul dan nama penulis
 Allen, M. "A Growing Union". *New York Post*. March 20, 1998. pp. 4.
 - c. Artikel dengan judul tetapi tanpa penulis
 "Terpuruknya Dunia Bisnis Perbankan". *Jawa Pos*. 30 September 1998. hal. 3.
 - h. **Jurnal, Buletin, Majalah dan Penerbitan Berkala**
 Soejono, I dan A.T. Birowo. 1976. "Distribusi Pendapatan di Pedesaan Padi Sawah di Jawa Tengah". *Prisma*. 1: hal. 26-32.
 Snitzler, JR. 1958. "How Wholesalers Can Cut Delivery Costs". *Journal of Marketing*. 23: pp. 21-28.
 - i. **Hasil Penelitian**
 Kasryno, F. et al. 1981. *Perkembangan Institusi dan Pengaruhnya terhadap Distribusi Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja: Studi kasus di Empat Desa di Jawa Barat*. Bogor: Studi Dinamika Pedesaan.
 - j. **Kertas Kerja Diskusi Panel, Seminar dan Lokakarya**
 Manao, H. 2007. "Sistem Informasi Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan", Makalah disampaikan pada The 1st Accounting Conference Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
 - k. **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**
 Julianti, A.S. 2008. "Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Skripsi Sarjana tak dipublikasikan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
 - l. **Artikel dalam Ensiklopedia**
 Banta, R.E. "New Harmony". *Encyclopedia Britanica*. 1968 Edition. Vol. 16, pp. 305.
 - m. **Wawancara**
 Burrows, L. Personal Interview on Puerto Rican Workers in a New York City Hospital, Mt. Sinai Hospital. New York. N.Y. 3 Juni 1998.
 - n. **Terjemahan dari Pengarang Lain**
 Klinchin, A.I. 1957. *Mathematical Foundations of Information Theory*, diterjemahkan oleh Silverman, R.A. dan M.D. Friedman. New York: Dover.
 - o. **Internet**
 - a. Rujukan dari Internet berupa Karya Individual
 Donald, P., L. Harby dan W. Gary. 1998. A Study on Agricultural Area Online Journals. 193-197: *The Poverty among the Rich*. (Online). (<http://journal.ccs.soton.ac.uk/study.html>, diunduh 12 Juni 1998).
 - b. Rujukan dari Internet berupa Artikel dari Jurnal

Hartono. 1999. Peningkatan Kinerja Buruh Perusahaan melalui Reward System. *Jurnal Manajemen*. (Online). Jilid 7. No.3. (<http://www.malang.ac.id>, diunduh 10 Mei 2000).

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DITINJAU
DARI FISCAL KNOWLEDGE, LOCUS OF CONTROL, DAN
INTERAKSI ANTARA FISCAL KNOWLEDGE DENGAN
LOCUS OF CONTROL**

Ika Fransisca
Praktisi Pajak
fransisca.ika@gmail.com

Abstract

Indonesia adopts a self assessment that requires an awareness and volunteerism taxpayer in carrying out tax obligations. To support the success of this system, taxpayer compliance is absolutely necessary. These various factors shown to affect the level of tax compliance, such as age, gender, level of education, the income, or employment status, the influence of friends or other taxpayer, ethics, taxation sanctions, complexity, relationship with the tax authorities, income sources, an understanding of the quality taxation system, the possibility of tax audit and tax rates, knowledge/understanding of tax. This research reinforces previous research conducted by Groenland and Veldhoven (1983) to determine differences in individual taxpayer compliance in Surabaya in terms of fiscal knowledge, locus of control, and the interaction of both. Anticipated differences in fiscal knowledge, locus of control orientation, and interaction both able to explain the differences compliance WPOP in Surabaya and surrounding areas. One hundred and fifty questionnaires were distributed to a number of WPOP in Surabaya and surrounding areas. Of the 150 questionnaires were only 82 questionnaires that can be processed further. By using statistical analysis tools Kruskal Wallis non-parametric, this study failed to reject the null hypothesis for all of the proposed hypothesis, which means there is no difference in the level of compliance WPOP Surabaya based fiscal knowledge, locus of control, and the interaction of both. The difference results of this study with previous studies because the majority of the answers WPOP were obedient and almost all respondents have an internal locus of control.

Keywords: Tax Compliance, Locus Of Control, Fiscal Knowledge.

Pendahuluan

Setiap warganegara dituntut untuk memenuhi kewajibannya kepada negara, salah satunya adalah kewajiban terkait dengan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang turut berperan dalam terciptanya kestabilan perekonomian nasional. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional (Brodjonegoro, 2009). Ketergantungan penerimaan negara dari sektor perpajakan makin meningkat dari tahun ke tahun. Bila pada era 1970-1980an negara ini mengandalkan sumber daya

alam, maka kini sektor perpajakanlah yang lebih diandalkan. Realisasi penerimaan pajak dalam APBN 1991/1992 mencapai Rp 20,1 triliun. Dua puluh tahun kemudian, yaitu tahun 2011 jumlah penerimaan pajak telah mencapai Rp872,6 triliun (<http://www.pajak.go.id>).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas *semi* pengampunan pajak yang berupa kebijakan pemberian penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga (diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) yang lebih dikenal dengan istilah *Sunset Policy*. Dalam pelaksanaannya, ternyata *Sunset Policy* belum mampu memberikan hasil yang optimal, terutama dalam hal komposisi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPhOP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak (WP) masih didominasi oleh WP Badan yaitu sebesar 78%, dan baru sisanya WP Orang Pribadi sebesar 22% (Brodjonegoro, 2009).

Sesungguhnya tingkat kepatuhan WP tidak dipandang dari besarnya jumlah pajak yang dibayarkan, namun dilihat dari pemahaman dan kepatuhan WP yang bersangkutan terhadap hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, termasuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya tingkat kesadaran ini mutlak dibutuhkan karena Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh bagi WP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya mulai dari melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajak, memungut pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak tanpa menunggu ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus (Waluyo, 2008).

Dengan sistem *self assessment*, diharapkan kepatuhan WP meningkat karena WP dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetapi dalam pelaksanaannya belum tercapai. Masih banyak penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan WP. Tidak sedikit WP yang dengan sengaja belum/tidak melakukan pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Misal pada tahun 2000, dari 200 juta penduduk Indonesia hanya 1,3 juta saja yang terdaftar sebagai WP (Santoso, 2008). Sementara itu, sampai dengan akhir 2009, dari 283.118 WPOP dan 64.142 WP Badan yang terdaftar di Jawa Timur, hanya 266.126 WPOP dan 55.864 WP Badan yang efektif (Jawa Pos, 16 Desember 2009). WP yang belum ber-NPWP maupun tidak efektif itu umumnya enggan patuh karena merasa belum menikmati kontribusi langsung dari pajak yang mereka bayar bagi negara dan masyarakat (Supriyati dan Hidayati, 2008), mereka cenderung menganggap pajak sebagai *cost* yang membebani tanpa ada manfaatnya. Menurut Budiono (2003) dalam Supriyati dan Hidayati (2008), tingkat pemahaman WP terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia masih minim. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pajak yang diberikan, baik melalui televisi, radio, surat kabar, internet, seminar, dan sebagainya dipandang masih kurang dan tidak kontinu. Studi Bank Dunia yang dimuat di Harian Kompas, 25 November 2005, menunjukkan 53,5% subyek menyatakan tidak mengetahui sama sekali proses perhitungan pajak yang

dibebankan kepada dirinya selama ini, dan 46,2% subyek mengaku tidak mengetahui penggunaan dana pajak selama ini (Wisnuharjantho, 2008).

Karena ketidaktahuan, sebagian WP menjadi tidak patuh. WP yang tidak tahu umumnya tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban WP sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Di lain pihak, WP yang memiliki pengetahuan yang cukup, bahkan lebih, tetap saja memilih untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Groenland dan Veldhoven, 1983). Hal ini terjadi karena WP sebagai individu yang terlahir dengan atribut personal yang berbeda-beda memiliki kecenderungan untuk bereaksi berbeda terhadap situasi berbeda, termasuk terhadap kepercayaan/tanggung jawab perpajakan yang dibebankan kepadanya. Groenland dan Veldhoven (1983) membuktikan bahwa WP yang tidak percaya pada nasib, keberuntungan, dan sejenisnya cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak ketika tingkat pengetahuannya tinggi.

Penelitian Groenland dan Veldhoven (1983) menemukan bahwa interaksi antara atribut personal yang diukur dengan *locus of control* dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Jackson dan Milliron (1986) menyebutkan ada 14 faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, besar penghasilan, status atau pekerjaan, pengaruh teman atau WP lain, etika, sanksi perpajakan, kompleksitas, hubungan dengan fiskus, sumber penghasilan, pemahaman tentang kualitas sistem perpajakan, kemungkinan pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Weigel *et al.* (1987), Alm (1991), Hessing *et al.* (1998), dan Cialdini (1989) dalam Hanno dan Violette (1996) menemukan bahwa perilaku WP dipengaruhi oleh faktor sosial dan individual. Faktor sosial dan individual dapat dijabarkan ke dalam beberapa faktor, antara lain *audit rates* (Dubin *et al.*, 1990; Beck *et al.*, 1991; Spicer dan Hero, 1985 dalam Hanno dan Violette, 1996), tingkat sanksi perpajakan yang dibebankan pada WP (Chang *et al.*, 1987; Collins dan Plumlee, 1991; Witte dan Woodbury, 1985; Dubin dan Wilde, 1988 dalam Hanno dan Violette, 1996), pengaruh tekanan sosial (Kaplan dan Reckers, 1985; Meier dan Johnson, 1977; Sherif dan Sherif, 1964; Steenbergen *et al.*, 1992 dalam Hanno dan Violette, 1996) dan tingkat sensitivitas tiap individu pada risiko (Beck *et al.*, 1991; Milliron, 1986; Beck dan Jung, 1989 dalam Hanno dan Violette, 1996), adil/tidaknya peraturan perpajakan (Spicer dan Becker, 1980; Scott dan Grasmick, 1981; Etzioni, 1986 dalam Hanno dan Violette, 1996), insentif keuangan dan nilai-nilai moral (Baldry, 1987 dalam Hanno dan Violette, 1996).

Penelitian mengenai kepatuhan WP di Indonesia dilakukan oleh Supriyati dan Hidayati (2008) yang meneliti pengaruh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kriteria WP patuh terhadap kepatuhan WP Badan di KPP Sidoarjo Timur. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Sementara dua variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Dari penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) dapat ditarik simpulan sementara bahwa untuk meningkatkan kepatuhan WP maka pemerintah wajib meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Satu hal yang perlu dicatat dari simpulan sementara di atas adalah jangan melupakan adanya atribut personal yang melekat pada masing-

masing individu, khususnya WPOP. Penelitian Groenland dan Veldhoven (1983) menemukan bahwa interaksi antara atribut personal yang diukur dengan *locus of control* dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di Belanda. Salah satu hasil penelitian tersebut menemukan adanya kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak pada WP berpengetahuan pajak tinggi yang *locus of control*-nya internal.

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti perbedaan tingkat kepatuhan WPOP ditinjau dari tingkat pengetahuan tentang pajak penghasilan orang pribadi dan *locus of control* WPOP, serta ditujukan untuk meneliti hubungan antara tingkat kepatuhan WPOP dengan interaksi tingkat pengetahuan tentang pajak penghasilan orang pribadi dan *locus of control* WPOP. Tingkat kepatuhan WPOP dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tinggi (patuh) dan rendah (tidak patuh). WPOP yang patuh adalah WPOP yang melaporkan seluruh penghasilan, aset, dan hutang dalam SPT Tahunan PPh sehingga WPOP tersebut membayar pajak dalam jumlah sama dengan pajak yang seharusnya terutang. Sedangkan WPOP yang tidak patuh didefinisikan sebagai WPOP yang tidak atau belum melaporkan seluruh penghasilan dan atau aset dan atau hutang dalam SPT Tahunan PPh, sehingga WPOP tersebut membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil daripada yang seharusnya terutang.

Groenland dan Veldhoven (1983) membedakan pengetahuan tentang pajak (*knowledge*) menjadi dua, yaitu *general fiscal knowledge* dan *knowledge of fiscal fraud*. *General fiscal knowledge* adalah pengetahuan seseorang mengenai pajak tanpa adanya bantuan dari ahli perpajakan. Sementara itu, *knowledge of fiscal fraud* merupakan pengetahuan mengenai tindakan penghindaran pajak secara ilegal. Penelitian ini mendefinisikan pengetahuan WPOP tentang pajak sebagai pengetahuan WPOP tentang Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia, meliputi cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi (*fiscal knowledge*).

Locus of control merupakan sebuah dimensi personalitas yang diperkenalkan oleh Rotter (1966). Rotter membedakan orientasi individu ke dalam orientasi internal dan eksternal. Seseorang yang memiliki *locus of control* internal adalah pihak yang percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang mereka hadapi. Sementara itu, mereka dengan *locus of control* eksternal cenderung melekatkan *outcomes* sebagai hasil dari lingkungan seperti keberuntungan atau nasib yang tidak dapat dikendalikan.

Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada WPOP yang berdomisili di wilayah Surabaya. WPOP dipilih sebagai obyek penelitian karena variabel penelitian *fiscal knowledge* dan *locus of control* merupakan atribut personal yang melekat pada tiap individu. Area penelitian yang terpusat di Surabaya menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini yang konsekuensinya adalah hasil penelitian ini tidak dapat semata-mata digeneralisasi begitu saja. Penelitian ini bertujuan deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan WPOP berdasarkan *fiscal knowledge* dan *locus of control*, serta untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan WPOP dengan interaksi *fiscal knowledge* dan *locus of control*.

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang diharapkan mampu menambah bukti empiris mengenai kepatuhan WP, khususnya WPOP di Surabaya. Rumusan masalah penelitian adalah: (a) Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara WPOP yang memiliki *fiscal knowledge* tinggi dengan yang rendah?, (b) Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara WPOP dengan *locus of control* internal dengan WPOP dengan *locus of control* eksternal?, (c) Apakah WPOP yang memiliki *locus of control* internal lebih tidak patuh daripada WPOP yang memiliki *locus of control* eksternal, ketika *fiscal knowledge*-nya tinggi?, (d) Apakah WPOP yang memiliki *locus of control* internal lebih patuh daripada WPOP yang memiliki *locus of control* eksternal, ketika *fiscal knowledge*-nya rendah?

Rerangka Teori dan Hipotesis

Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Adam Smith, sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2008:13) menyatakan bahwa "pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas (1) *equality*, (2) *certainty*, (3) *convenience*, dan (4) *economy*". Pada dasarnya, pemungutan pajak seyogyanya dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Aparat pemerintah (fiskus) diharamkan mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan pemaksaan yang berlebihan saat memungut pajak dari WP. Adam Smith juga mengungkapkan bahwa hendaknya pemungutan pajak dilakukan saat warganegara memperoleh penghasilan atau *Pay As You Earn* (PAYE). Biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimal mungkin.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi ke dalam 3 sistem yaitu: (a) *Official Assessment System*, (b) *Self Assessment System*, dan (c) *Withholding System* (Waluyo, 2008:17). Sistem pemungutan pertama merupakan sistem pemungutan yang sepenuhnya memberikan wewenang kepada *official* (fiskus) untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar kepada negara. WP bersifat pasif dan hanya berkewajiban membayar pajak sebesar jumlah yang tertera pada hasil perhitungan yang dibuat oleh fiskus, contoh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sistem ini pernah dianut di Indonesia untuk PPh, namun sejak diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan PPh di Indonesia berubah menjadi *self assessment* (Darussalam, 2007). Menurut *self assessment system*, WP diberi kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara (*self assess*). Sistem pemungutan yang ketiga, sistem *withholding*, merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melakukan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak kepada negara. Sebagai contoh adalah PPh Pasal 21 atas gaji, di mana perusahaan sebagai pihak ketiga diberi kewenangan untuk memungut/memotong pajak atas penghasilan/gaji yang diterima oleh karyawannya dan kemudian menyetorkan pajak tersebut kepada negara (Waluyo, 2008).

Terlepas dari sistem pemungutan yang dipergunakan, sesungguhnya yang diharapkan oleh pemerintah adalah peranan masyarakat untuk berperan dalam

pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Namun demikian, masih banyak warganegara yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan berbagai tindakan perlawanan terhadap pajak.

Kepatuhan Perpajakan

Nurmantu (2003) dalam Santoso (2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut, WP tidak dipaksa, diancam, diperiksa, diinvestigasi, dikenakan sanksi hukum maupun administrasi, maupun diberi peringatan terlebih dahulu. Artinya, WP secara sukarela memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku (Gunadi, 2005 dalam Santoso, 2008). Pasal 2 ayat (1) UU KUP mewajibkan WP untuk secara sukarela mendaftarkan dirinya untuk ber-NPWP ketika telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”

Syarat subyektif mengikat pada subyeknya, yaitu WP itu sendiri. Pasal 2 ayat (2) UU PPh menyebutkan bahwa seseorang disebut memenuhi syarat subyektif bila orang itu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak yang bersangkutan berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat obyektif lebih menekankan pada obyeknya yaitu penghasilan. Syarat obyektif terpenuhi ketika penghasilan yang diterima termasuk dalam pengertian obyek pajak. Lebih lanjut, Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-161/PJ/2001 mengatur kewajiban memiliki NPWP bagi orang pribadi yang menjalankan usaha (misalnya pemilik bengkel, pedagang, dan sejenisnya) atau pekerjaan bebas (dokter, notaris, arsitek, dan sejenisnya), dan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (karyawan). Khusus untuk karyawan, persyaratan obyektif terpenuhi ketika penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun. Berdasarkan UU PPh, PTKP setahun berjumlah Rp 15.840.000 untuk setiap diri WP dan Rp 1.320.000 untuk status kawin dan setiap tanggungan maksimum 3 orang.

Lebih lanjut, *Practice Note* tentang *Compliance Measurement* yang diterbitkan oleh OECD (2001) dalam Santoso (2008) membagi kepatuhan WP ke dalam dua kategori, yaitu: (1) kepatuhan administratif (*administrative compliance*), dan (2) kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural, yaitu kepatuhan formal yang terkait dengan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) termasuk di dalamnya mendaftar NPWP ketika syarat subyektif dan obyektif terpenuhi. Sedangkan kepatuhan teknis mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak yaitu kepatuhan

material yang terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar (Santoso, 2008).

Ketika WP tidak patuh, maka negara akan menghadapi risiko atas penerimaan yang hilang dari WP yang tidak patuh karena ada pajak terutang yang tidak dibayar. Tingkat ketidakpatuhan dibedakan berdasarkan risikonya menjadi 3 kelompok yaitu: (1) kelompok risiko ketidakpatuhan rendah, (2) kelompok risiko ketidakpatuhan menengah, dan (3) kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi (OECD, 2005 dalam Santoso, 2008). Kelompok risiko ketidakpatuhan rendah meliputi WP yang secara sadar memiliki keinginan dan komitmen untuk patuh, kelompok ini sepenuhnya mendukung dan menerima sistem perpajakan yang ada. Kelompok kedua yaitu risiko ketidakpatuhan menengah adalah mereka yang pada prinsipnya bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan, namun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman atas kewajiban perpajakannya. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi adalah kelompok WP yang secara sadar tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakan atau wajib pajak dengan sengaja tidak mau mengikuti sistem perpajakan yang berlaku.

Social Learning Theory

Phares (1976) dalam Indriantoro (1993:31) mendefinisikan *social learning theory* sebagai "*a theory of how choices are made by individuals from the variety of potential behaviors available for them*". Teori ini muncul karena adanya keingintahuan untuk dapat memprediksi dan mengubah perilaku individu secara lebih efisien. Rotter (1982) menyatakan tujuan utama teori ini adalah (1) menghasilkan teori yang memadai yang dapat menjelaskan bagaimana orang belajar atau memiliki karakteristik perilaku dan sikap, (2) memprediksi pemilihan perilaku individu pada situasi tertentu, (3) mengembangkan bahasa deskriptif yang handal dan efisien, yang terintegrasi dengan *process theory* yang dapat melukiskan perbedaan perilaku individu pada situasi yang sama atau hampir sama, dan (4) memahami bagaimana dan dalam kondisi apa sikap maupun perilaku tersebut berubah.

Terdapat 3 komponen dasar dalam *social learning theory* yaitu: (1) *behavior potential*, (2) *expectancy*, dan (3) *reinforcement value* (Rotter, 1954:49). *Behavior potential* didefinisikan sebagai "*potentiality of any behavior's occurring in any given situation or situations as calculated in relation to any single reinforcement or set of reinforcements*" (Rotter, 1954:49). Menurut Rotter, setiap individu memiliki perilaku yang paling potensial dari antara perilaku-perilaku lain yang mungkin dilakukannya di kala individu tersebut menghadapi situasi tertentu. Perilaku yang paling potensial disebut *behavior potential*.

Expectancy didefinisikan sebagai "*the probability held by the individual that a particular reinforcement will occur as a function of a specific behavior on his part in a specific situation or situations. Expectancy is independent of the value or importance of the reinforcement*" (Rotter, 1954:50). *Expectancy* (ekspektasi) menunjukkan seberapa besar kemungkinan sebuah perilaku akan membuahkan hasil. Individu dengan ekspektasi tinggi merupakan individu yang yakin bahwa perilakunya membuahkan hasil, sebaliknya individu dengan ekspektasi rendah

tidak memiliki keyakinan seperti itu. Ekspektasi ini bersifat subyektif dan terbentuk berdasarkan pengalaman masa lalu individu (Mearns, 2009).

Reinforcement value didefinisikan Rotter (1954:51) sebagai "*the degree of preference for any reinforcement to occur if the possibilities of their occurring were all equal*". *Reinforcement value* mengacu pada hasrat individu terhadap hasil yang bisa berupa sesuatu yang ingin dicapai maupun sesuatu yang tidak ingin dicapai. *Reinforcement value* bersifat subyektif dan bergantung pada pengalaman hidup individu (Mearns, 2009).

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, Rotter (1954) kemudian merumuskan *behavior potential* sebagai fungsi dari *expectancy* dan *reinforcement value*. Artinya, kecenderungan seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan membawa hasil (*expectancy*) serta hasrat seseorang terhadap hasil tersebut (*reinforcement value*).

Locus of Control

Konsep *locus of control* atau yang dikenal dengan *generalized expectancies for control of reinforcement* (Rotter, 1966) muncul dari hasil pemikiran *social learning theory* (Rotter, 1954). *Locus of control* mempelajari sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Individu yang percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang dihadapi dikelompokkan oleh Rotter sebagai mereka dengan *locus of control* internal. Sementara individu yang tidak percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang dihadapi dikelompokkan sebagai mereka dengan *locus of control* eksternal. Kelompok kedua ini percaya pada takdir, nasib, keberuntungan dan semacamnya.

Penelitian mengenai *generalized expectancy in external control* dimulai pertama kali oleh Phares (1957) dalam Indriantoro (1993). Phares mengembangkan tipe skala Likert dengan 13 pernyataan yang menyatakan sikap eksternal dan 13 lainnya menyatakan sikap internal. Phares menemukan bahwa pernyataan yang menyatakan arah sikap eksternal menghasilkan prediksi yang lemah, individu dengan sikap eksternal akan berperilaku serupa dengan seluruh subyek lainnya baik dalam situasi "untung-untungan" maupun dalam situasi yang "butuh upaya". Pada tahun 1957, James (1957) dalam Indriantoro (1993) melakukan revisi atas penelitian Phares. Dalam disertasinya, James mempergunakan format Likert dengan 26 pernyataan ditambah pernyataan *filler* berdasarkan pernyataan-pernyataan Phares yang berhasil. Pada akhirnya, Rotter (1966) sampai pada versi akhir, yaitu dengan 29 pernyataan, *forced-choice test* termasuk 6 pernyataan *filler* yang dibuat supaya tujuan tes ini tidak jelas terlihat (yaitu pernyataan nomor 1, 8, 14, 19, 24, dan 27). Dalam perkembangan selanjutnya, versi akhir Rotter (1966) ini dikenal sebagai *I-E Scale*. Versi inilah yang dipergunakan untuk mengukur variabel *locus of control* dalam penelitian ini.

Pada tahun 1988, Spector (1988) dalam Indriantoro (1993) mengembangkan *I-E Scale* menjadi skala yang khusus diperuntukkan bagi dunia kerja, yang dikenal dengan nama Work Locus of Control Scale (WLCS), yang terdiri 16 pengukuran. WLCS berkorelasi signifikan dengan kepuasan kerja, keinginan untuk berhenti, penerimaan pengaruh di tempat kerja, *role stress*, dan persepsi terhadap gaya

atasan/supervisor. Lebih lanjut, Lefcourt (1991) dalam Indriantoro (1993) menyajikan ringkasan menyeluruh mengenai I-E Scale. Lefcourt menganalisis 16 pengukuran dalam I-E Scale dan mengklasifikasikannya ke dalam 4 bagian, yaitu pengukuran dewasa, pengukuran anak-anak, pengukuran untuk tujuan tertentu, dan pengukuran terkait kesehatan.

Sementara itu, terkait dengan perilaku wajib pajak, I-E Scale juga dipergunakan untuk meneliti perilaku penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Groenland dan Veldhoven (1983) ini berhasil membuktikan bahwa *locus of control* dengan interaksinya dengan tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap perilaku perlawanan pajak. Semakin internal seseorang, semakin tinggi kemungkinan orang tersebut melakukan perlawanan pajak.

Fiscal Knowledge

1. Knowledge

Pengetahuan muncul akibat adanya banyak gejala yang berbeda-beda. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna melakukan pengamatan dengan indera dan atau akal budinya untuk mengenali gejala-gejala, dan kemudian berhasrat untuk mencari kesatuan dari banyak gejala yang ada itu. Ilmu pengetahuan di kemudian hari terbentuk sebagai usaha untuk secara metodis dan sistematis mencari asas-asas yang mengijinkan untuk memahami kesatuan dan perkaitan satu sama lain antara banyak gejala tersebut (Melsen, 1985).

Knowledge (ilmu pengetahuan) didefinisikan oleh Oxford English Dictionary (Hornby, 2000:658) sebagai:

- i. *"the information, understanding and skills that you gain through education or experience;*
- ii. *the state of knowing about a particular fact or situation."*

Pada dasarnya, pengetahuan muncul akibat keingintahuan manusia terhadap sesuatu. Dalam rangka memuaskan rasa keingintahuan tersebut, manusia lalu mencari tahu melalui berbagai media misalnya menempuh pendidikan, melakukan eksperimen, dan sebagainya. Pengetahuan juga dapat terbentuk dengan sendirinya dari pengalaman dan proses belajar. Secara klasik, Aristoteles membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu ilmu praktis dan ilmu teoritis. Ilmu praktis diarahkan pada praktik, sedangkan ilmu teoritis ditujukan pada prinsip yang menyangkut cara memandang realitas. Ilmu praktis dibagi menurut sifatnya yaitu etika, poetika, dan logika. Etika menyangkut tindakan, poetika menyangkut perbuatan/proses, dan logika menyangkut argumentasi yang tepat (Melsen, 1985). Sedangkan ilmu teoritis meliputi ilmu alam yang memandang realitas menurut aspek-aspeknya yang material dan kualitatif, matematika atau ilmu pasti yang memandang aspek-aspek kuantitatif, dan metafisika yang memandang realitas menurut aspek-aspeknya yang paling umum dan fundamental, yaitu sejauh realitas itu ada. Dalam proses pemahaman, ilmu alam menuntut adanya pengalaman yang lebih kompleks daripada ilmu pasti (Melsen, 1985).

2. Fiscal Knowledge Sebagai Bagian Dari Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan tentang pajak merupakan salah satu bentuk pengembangan dari ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui proses pemahaman dan

pengalaman. Groenland dan Veldhoven (1983) membedakan pengetahuan tentang pajak menjadi dua yaitu *general fiscal knowledge* dan *knowledge of fiscal fraud*. *General fiscal knowledge* merupakan pengetahuan seseorang mengenai pajak tanpa adanya bantuan ahli perpajakan. Sementara itu, *knowledge of fiscal fraud* adalah pengetahuan mengenai tindakan penghindaran pajak secara ilegal.

Pemahaman peraturan perpajakan (khususnya *fiscal knowledge*) yang baik akan mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Fiscal knowledge* di Indonesia meliputi pengetahuan WP tentang Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan seluruh jenis pajak. Eriksen dan Fallan (1996) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang diterima WP merupakan faktor penting dalam pemahaman Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Selanjutnya Supriyati dan Hidayati (2008) menemukan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.

Hipotesis

Dengan menginteraksikan pengetahuan WPOP tentang pajak (*fiscal knowledge*) dan *locus of control*, penelitian ini ingin mengetahui perbedaan kepatuhan WPOP berdasarkan tingkat *fiscal knowledge*, *locus of control*, dan interaksi antara *fiscal knowledge* dengan *locus of control*. Penelitian ini ingin memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Groenland dan Veldhoven (1983) mengenai pengaruh atribut personal (*locus of control*), karakteristik situasional dan *knowledge* terhadap perilaku penghindaran pajak di Belanda. Hasil penelitian Groenland dan Veldhoven (1983) menunjukkan bahwa interaksi antara *education* (pengetahuan pajak) dan *locus of control* merupakan faktor terpenting yang menjelaskan perilaku penghindaran pajak. Groenland dan Veldhoven (1983) menemukan bahwa hubungan antara pengetahuan pajak dan perilaku penghindaran pajak pada individu dengan *locus of control* internal lebih kuat daripada *locus of control* eksternal.

Untuk memperkuat hasil penelitian Groenland dan Veldhoven (1983), penelitian ini dimaksudkan meneliti perbedaan kepatuhan WPOP berdasarkan tingkat *fiscal knowledge* dan *locus of control*. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara WPOP yang memiliki *fiscal knowledge* tinggi dan yang rendah.
- H2: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara WPOP dengan *locus of control* internal dan WPOP dengan *locus of control* eksternal.

Seseorang yang memiliki *locus of control* internal percaya bahwa mereka dapat mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang mereka hadapi (*master of their own destiny*). Sedangkan mereka dengan *locus of control* eksternal merasa bahwa peristiwa yang terjadi adalah di luar kendali mereka karena semua itu ditentukan oleh nasib, keberuntungan, dan sebagainya (Rotter, 1966). WPOP yang memiliki *locus of control* internal lebih boleh jadi mengambil tindakan yang berisiko (tidak patuh), terutama ketika WPOP tersebut memiliki *fiscal knowledge* yang memadai. Hal ini diduga terjadi akibat adanya kepercayaan bahwa mereka

mampu mengendalikan situasi dan konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Di lain pihak, seorang WPOP berpengetahuan tinggi dengan *locus of control* eksternal akan cenderung bertindak lebih hati-hati sehingga diduga mereka bertindak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan deskripsi di atas, hipotesis ini memprediksi kemungkinan adanya hubungan antara kepatuhan WPOP dengan interaksi antara *fiscal knowledge* dan *locus of control* yang dirumuskan sebagai berikut:

H3: Ketika *fiscal knowledge* tinggi, WPOP yang memiliki *locus of control* internal lebih tidak patuh daripada WPOP yang memiliki *locus of control* eksternal.

WPOP yang *locus of control*-nya internal akan cenderung bersikap lebih patuh ketika pengetahuannya kurang memadai. Mereka tidak memiliki cukup kepercayaan diri (akibat tidak memiliki cukup pengetahuan) dalam mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Di lain pihak, mereka yang lebih mengandalkan pada takdir, nasib dan semacamnya (*locus of control* eksternal), akan lebih nekat melakukan tindakan berisiko walaupun mereka tidak memiliki cukup pengetahuan.

Sebagaimana hipotesis sebelumnya, hipotesis berikut juga memprediksi kemungkinan adanya hubungan antara kepatuhan WPOP dengan interaksi antara *fiscal knowledge* dan *locus of control*:

H4: Ketika *fiscal knowledge* rendah, WPOP yang memiliki *locus of control* internal lebih patuh daripada WPOP yang memiliki *locus of control* eksternal.

Metode Penelitian

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian adalah: Tingkat kepatuhan WPOP (PTH), *Fiscal Knowledge* (FK), dan *Locus of Control* (LOC). Definisi operasional dan ukuran dari tiap variabel adalah:

1. Tingkat kepatuhan WPOP (PTH)

Variabel tingkat kepatuhan WPOP dibedakan menjadi dua, yaitu tinggi (patuh) dan rendah (tidak patuh). Kepatuhan WPOP disebut tinggi (patuh) apabila WPOP tersebut dengan sukarela memiliki kesediaan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kriteria WPOP patuh pada penelitian ini adalah WPOP yang:

1. Memenuhi kepatuhan teknis yaitu bersedia dengan sukarela melaporkan seluruh penghasilan, aset, dan hutang dalam SPT Tahunan PPh sehingga WPOP tersebut membayar pajak dalam jumlah sama dengan pajak yang seharusnya terutang.
2. Memenuhi kepatuhan administratif yaitu patuh dalam pelaporan dan prosedural, memenuhi kepatuhan formal dalam UU KUP, termasuk secara sukarela memiliki NPWP tanpa dipaksa, diancam, dihimbau, maupun diberi peringatan terlebih dahulu (Gunadi, 2005 dalam Santoso, 2008).

Kepatuhan WPOP disebut rendah (tidak patuh) apabila WPOP tersebut tidak memiliki kesediaan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kriteria WPOP tidak patuh pada penelitian ini adalah WPOP yang:

1. Tidak memenuhi kepatuhan teknis yaitu tidak bersedia dengan sukarela melaporkan seluruh penghasilan dan atau aset dan atau hutang dalam SPT Tahunan PPh sehingga WPOP tersebut membayar pajak lebih kecil daripada pajak yang seharusnya terutang.
2. Tidak memenuhi kepatuhan administratif yaitu tidak patuh dalam pelaporan dan prosedural, serta tidak memenuhi kepatuhan formal yang terkait dengan UU KUP (Santoso, 2008). Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, termasuk dalam kategori WP tidak patuh adalah WP yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif namun tidak/belum mau secara sukarela mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.

Variabel kepatuhan WPOP diukur dengan *category rating scale* berupa pilihan jawaban 1 (patuh) atau 2 (tidak patuh). Untuk mengukur tingkat kepatuhan, subyek diminta untuk menjawab 8 buah kasus. Kasus 1, 2, 3, dan 4 mewakili pertanyaan terkait kepatuhan teknis WPOP, sementara kasus 5, 6, 7, dan 8 mewakili pertanyaan mengenai kepatuhan administratif WPOP. Penelitian ini tidak membagi kepatuhan berdasarkan kepatuhan administratif dan teknis, pembagian kepatuhan administratif dan teknis pada kuesioner dilakukan agar kasus yang diberikan mampu mewakili 2 jenis kepatuhan. Tingkat kepatuhan WPOP dalam penelitian ini hanya dibedakan menjadi patuh atau tidak patuh sebagaimana didefinisikan pada paragraf sebelumnya. Pada akhir setiap kasus, subyek diminta untuk menunjukkan sikap yang dipilih dengan cara mengisi pilihan jawaban 1 (patuh) atau 2 (tidak patuh).

2. *Fiscal Knowledge* (FK)

Fiscal knowledge didefinisikan sebagai pemahaman WPOP tentang Undang-Undang perpajakan di Indonesia, meliputi dasar perhitungan (misalnya: apa saja obyek pajak, subyek pajak, PTKP, dan sebagainya), penyeteroran dan pelaporan PPh OP. Untuk mengetahui tingkat *fiscal knowledge*, subyek diminta untuk menilai kebenaran lima belas pernyataan seputar cara perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh OP dengan cara memilih salah satu pilihan benar atau salah.

Setiap jawaban yang benar diberi skor 2, sedangkan jawaban yang salah diberi skor 0. Penentuan tinggi atau rendahnya FK seorang responden ditentukan dengan mempergunakan salah satu batas antara 60% jawaban benar, 65% jawaban benar, 70% jawaban benar, atau 80% jawaban benar. Penggunaan batasan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai reliabilitas yaitu koefisien Cronbach Alpha tertinggi.

3. *Locus of Control* (LOC)

Variabel kedua adalah *locus of control* (internal atau eksternal). Pengukuran *locus of control* diperoleh dengan mempergunakan instrumen *Locus of Control* (I-E Scale) yang dikembangkan oleh Rotter (1966). Subyek diminta untuk menjawab 29 pertanyaan, dengan hanya 23 pertanyaan yang mempunyai arti. Tiap jawaban diberi skor 0 (internal) atau 1 (eksternal). Dengan demikian, skor maksimal yang mungkin diperoleh adalah 23. Apabila

skor yang diperoleh > 11 maka subyek dikategorikan sebagai WPOP dengan *locus of control* eksternal, sedangkan apabila skor yang diperoleh ≤ 11 maka subyek dikategorikan sebagai WPOP dengan *locus of control* internal.

Populasi, Sampel, dan Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah WPOP di Surabaya. Sampel penelitian terbagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut: (1) Mahasiswa Magister Manajemen sebuah universitas swasta di Surabaya, (2) Peserta Kursus Brevet Pajak IAI Cabang Surabaya, (3) Panitia Seminar Pajak yang diadakan PT Global Pratama Taxindo di Surabaya, (4) Peserta pelatihan IAPI Wilayah Indonesia Timur, (5) Karyawan beberapa perusahaan swasta dan sebuah Rumah Sakit swasta di Surabaya, (6) Wiraswastawan di Surabaya.

Pemilihan sampel dilakukan secara *convenience sampling* dari metode *non-probability sampling*. Subyek penelitian dipilih hanya yang telah memenuhi persyaratan suyektif dan obyektif sebagai WP, tidak peduli apakah subyek sudah memiliki NPWP atau belum. Pengisian kuesioner untuk tiap orang dilakukan secara random dengan waktu pengerjaan per orang +/- 30 menit.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Pilot test

Sebelum kuesioner yang sebenarnya dibagikan, terlebih dahulu diadakan *pilot test* untuk mengetahui apakah subyek dapat mengerti penugasan yang diberikan. *Pilot test* dilakukan pada 9 dosen Fakultas Ekonomi sebuah Universitas swasta di Surabaya, di mana kasus yang sama nantinya akan diberikan kepada subyek yang sebenarnya.

2. Membagikan kuesioner pada masing-masing responden.
3. Tiap subyek diminta untuk mengisi kuesioner yang terbagi dalam 3 bagian. Pada bagian 1, subyek diminta untuk menyelesaikan 8 kasus terkait kepatuhan WPOP. Pada akhir masing-masing kasus, subyek diminta untuk memilih satu dari 2 pilihan jawaban yang menunjukkan sikap yang diambil.
4. Subyek diminta untuk mengisi bagian 2 yang terdiri dari 29 pertanyaan *locus of control*. Subyek diminta untuk memilih satu dari kondisi (a) atau (b) dari setiap nomor pernyataan yang mencerminkan *locus of control* mereka.
5. Bagian 3 berisi lima belas pernyataan seputar PPh OP di Indonesia. Tiap subyek diminta memilih pilihan benar untuk setiap pernyataan yang menurut mereka benar atau memilih pilihan salah untuk setiap pernyataan yang menurut mereka adalah salah.
6. Subyek juga diminta mengisi data demografi subyek, tiap subyek tidak diminta untuk mengisi nama dan diberikan jaminan kerahasiaan bahwa tiap pertanyaan hanya untuk tujuan penelitian.
7. Data tiap subyek yang terkumpul diperiksa kelengkapannya. Sampel yang diolah adalah data subyek yang lengkap dan isiannya sesuai dengan arah teoretis.

Prosedur Pengujian Hipotesis

Sebelum data dari kuesioner diolah dengan analisis statistika, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas mengacu pada instrumen pengukuran, yaitu menguji apakah instrumen pengukuran (pertanyaan dalam kuesioner) yang dipergunakan memang benar-benar dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Untuk menguji validitas instrumen pengukuran dipergunakan analisis korelasi, yaitu koefisien korelasi (r) atau *Pearson Product Moment Correlation*. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran bila pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Uji reliabilitas dipergunakan untuk menguji apakah responden menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan konsisten. Metode yang dipergunakan adalah koefisien Cronbach Alpha (α). Gliem dan Gliem (2003) mengindikasikan bahwa koefisien Cronbach Alpha berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 maka semakin tinggi tingkat konsistensi internal tiap pertanyaan dalam skala Likert. Selanjutnya George dan Mallery (2003) dalam Gliem dan Gliem (2003) menjelaskan *rules of thumb* koefisien Cronbach Alpha sebagai berikut: bila $\alpha > 0,9$ --*Excelent*, $\alpha > 0,8$ --*Good*, $\alpha > 0,7$ --*Acceptable*, $\alpha > 0,6$ --*Questionable*, $\alpha > 0,5$ --*Poor*, dan $\alpha < 0,5$ --*Unacceptable*. Sebuah variabel tidak dapat diolah lebih lanjut apabila Koefisien Cronbach Alpha-nya di bawah 0,5.

Setelah uji validitas dan reliabilitas, data sampel yang memenuhi syarat diolah dengan mempergunakan perangkat lunak SPSS versi 13 *for Windows*. Alat analisis berupa statistik non-parametrik Kruskal Wallis dengan tingkat signifikansi 5%. Uji statistik non-parametrik tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya (belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal). Statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal (Chaniago, 2009).

Prosedur pengujian beberapa hipotesis yang telah disusun adalah:

1. Pengujian hipotesis pertama dan kedua (H1, H2):

H1 bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan WPOP yang memiliki tingkat *fiscal knowledge* yang tinggi dengan yang rendah. Pengujian H1 dilakukan dengan mengolah skor tingkat *fiscal knowledge* WPOP dengan mempergunakan alat analisis statistik non-parametrik Kruskal Wallis. Hipotesis nol H1 ditolak apabila *p-value* lebih kecil atau sama dengan 5%.

H2 bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara WPOP yang memiliki *locus of control* internal dengan yang memiliki *locus of control* eksternal. Pengujian H2 dilakukan dengan mengolah skor tingkat *locus of control* WPOP dengan mempergunakan alat analisis statistik non-parametrik Kruskal Wallis. Hipotesis nol H2 ditolak apabila *p-value* lebih kecil atau sama dengan 5%.

2. Pengujian hipotesis ketiga dan keempat (H3, H4):

Pengujian hipotesis ketiga dan keempat bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara interaksi pemahaman *fiscal knowledge* dan *locus of control* dengan kepatuhan WPOP. Untuk menguji kedua hipotesis ini dipergunakan alat analisis yang sama yaitu statistik non-parametrik Kruskal Wallis. Hipotesis nol ditolak apabila *p-value* lebih kecil atau sama dengan 5%.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seratus lima puluh kuesioner dibagikan kepada 150 responden di Surabaya dan sekitarnya selama periode Desember 2009-Januari 2010. Dari 150 kuesioner yang dibagikan, kembali 114 kuesioner. Dari 114 yang kembali, 32 kuesioner tidak diisi dengan lengkap atau tidak memenuhi kriteria penelitian. Sampel akhir yang diperoleh sebanyak 82 responden atau 54,67 persen dari jumlah sampel awal. Delapan puluh dua sampel yang diolah mayoritas adalah responden wanita (46 orang wanita dan 36 orang pria) dengan sebaran usia 20-35 tahun sebanyak 55 responden, 36-50 tahun 20 responden, dan 7 responden sisanya berusia di atas 50 tahun. Dari data pekerjaan diketahui bahwa 50 responden adalah pegawai, 13 responden adalah wiraswastawan, 1 responden adalah mahasiswa, dan 18 lainnya berprofesi sebagai auditor (4 orang), dokter (3 orang), dosen (3 orang), dan profesi lain (tidak disebutkan dengan jelas profesinya) sebanyak 8 orang. Sebagian besar responden yaitu 61 orang telah memiliki NPWP dan hanya 21 orang yang belum dengan sukarela ber-NPWP. Dari kuesioner yang dibagikan terdapat beberapa responden yang bertempat tinggal di wilayah Gresik dan Sidoarjo. Responden ini tetap diperhitungkan sebagai sampel karena wilayah Gresik dan Sidoarjo sangat dekat dengan Surabaya, dan meskipun bertempat tinggal di Gresik dan Sidoarjo, para responden itu bekerja pada perusahaan yang berlokasi di Surabaya.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Pembagian Sel Jawaban Responden

FK	LOC	
	Internal (I)	Eksternal (E)
Tinggi (T)	Sel 1	Sel 2
Rendah (R)	Sel 3	Sel 4

Tabel 2. Data Demografi per Sel Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pekerjaan

Sel	Keterangan	Sampel	Jenis Kelamin		Pekerjaan		
			Pria	Wanita	Pegawai	Wiraswasta	Lainnya
1	Sel 1	27	15	12	19	4	4
2	Sel 2	13	5	8	10	0	3
3	Sel 3	34	12	22	18	8	8
4	Sel 4	8	4	4	3	1	4
TOTAL		82	36	46	50	13	19
PERSENTASE		100%	44%	56%	61%	16%	23%

Tabel 3. Data Demografi per Sel Berdasarkan Tempat Tinggal

Sel	Keterangan	Sampel	Tempat Tinggal di Surabaya					
			Pusat	Utara	Timur	Barat	Selatan	Sekitarnya
1	Sel 1	27	2	0	13	6	4	2
2	Sel 2	13	1	0	6	4	1	1
3	Sel 3	34	2	7	10	8	5	2
4	Sel 4	8	1	0	2	4	0	1
		82	6	7	31	22	10	6

Tabel 4. Data Demografi per Sel Berdasarkan Usia

Sel	Keterangan	Sampel	Minimum	Maximum	Mean
1	Sel 1	27	22	61	36,03703704
2	Sel 2	13	21	67	31
3	Sel 3	34	22	54	32,79411765
4	Sel 4	8	21	45	32

Tabel 5. Crosstabs variabel LOC dan PTH

PTHTOT * LOC Crosstabulation

Skor PTH	LOC		Total
	Eksternal	Internal	
PTHTO ,00 T	0	2	2
1,00	0	1	1
2,00	0	3	3
3,00	0	4	4
4,00	4	6	10
5,00	4	6	10
6,00	6	11	17
7,00	1	10	11
8,00	6	18	24
Total	21	61	82

Dari data demografi per sel diketahui bahwa sebagian besar sampel (34 orang) berada pada sel 3, yaitu subyek dengan *fiscal knowledge* rendah dan *locus of control* internal. Sementara subyek yang memiliki *fiscal knowledge* rendah dengan *locus of control* eksternal hanya 8 orang. Tabel 5 menyajikan hasil *crosstabulation* variabel LOC dan PTH, dan variabel FK dan PTH pada Tabel 6.

Tabel 6. Crosstabs Variabel FK dan PTH
PTHTOT * FK65 Crosstabulation

PTH	Skor	FK		Total
		Rendah	Tinggi	
PTHTO	,00	2	0	2
T	1,00	0	1	1
	2,00	2	1	3
	3,00	4	0	4
	4,00	4	6	10
	5,00	4	6	10
	6,00	8	9	17
	7,00	8	3	11
	8,00	10	14	24
Total		42	40	82

Crosstabulation pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa responden yang *locus of control*-nya eksternal memiliki skor PTH paling kecil sama dengan 4. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki skor kepatuhan rendah (skor 0-3). Sama halnya dengan responden dengan *locus* eksternal, responden internal juga lebih banyak yang memilih untuk bersikap patuh. *Crosstabulation* untuk variabel FK dan PTH (tabel 6) juga menunjukkan adanya dominasi jawaban patuh responden, baik yang memiliki FK tinggi maupun rendah.

Tabel 7 menunjukkan statistik deskriptif variabel tingkat kepatuhan WPOP. Rata-rata skor tingkat kepatuhan WPOP adalah 5,8537, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 8 serta standar deviasi sebesar 2,03744. Yang menarik adalah kekerapan munculnya skor 8 pada jawaban responden. Hal ini mendukung hasil *crosstabulation* pada tabel 5 dan 6. Sebagian besar responden (29%) menyatakan sikap patuh pada seluruh butir pertanyaan.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Kepatuhan WPOP

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTHTOT	82	,00	8,00	5,8537	2,03744
Valid N (listwise)	82				

Pilot Test, Uji Validitas, dan Reliabilitas

1. Pilot Test

Pilot test dilakukan pada 9 dosen Fakultas Ekonomi sebuah Universitas swasta di Surabaya (dari 10 kuesioner yang dibagikan, kembali 9 kuesioner). Rata-rata responden membutuhkan waktu 20-30 menit untuk mengisi kuesioner. Waktu terlalu lama dibutuhkan untuk mengisi bagian 2 (instrumen *locus of control*). Sedangkan bagian 1 (instrumen kepatuhan) dan bagian 3 (instrumen *fiscal knowledge*) diselesaikan dalam waktu yang relatif sama. Masukan dari responden saat *pilot test* adalah untuk memperpendek instrumen *locus of control* di bagian 2. Sayangnya, masukan tidak dapat diakomodasi karena instrumen *locus of control* yang dipergunakan mengadopsi instrumen

yang dikembangkan oleh Rotter (1966). Secara umum, responden tidak mengalami kesulitan dalam pemahaman dan pengisian kuesioner.

2. Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan analisis korelasi, yaitu koefisien korelasi (r) atau *Pearson Product Moment Correlation*. Data dikatakan *valid* bila koefisien korelasi masing-masing pertanyaan terbukti mempunyai korelasi signifikan dengan total pertanyaan. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, maka kriteria pengujian signifikansi adalah *valid* jika nilai $p \leq \alpha$.

a. Analisis Korelasi Instrumen Pengukuran Variabel Tingkat Kepatuhan WPOP. Hasil analisis korelasi dua kategori pertanyaan (pertanyaan teknis dan administratif) terhadap total pertanyaan menunjukkan korelasi yang signifikan. Koefisien korelasi masing-masing kategori pertanyaan adalah 0,868 dan 0,883 dengan nilai probabilitas 0,000. *Output* statistik menunjukkan adanya korelasi signifikan antara setiap butir pertanyaan kuesioner dengan total pertanyaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan merupakan instrumen yang *valid* untuk mengukur variabel tingkat kepatuhan WPOP.

b. Instrumen Pengukuran Variabel *Locus of Control*

Instrumen untuk mengukur variabel *locus of control* merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Rotter (1966). Instrumen ini sebelumnya telah diuji korelasinya dengan mempergunakan Marlow-Crowne Social Desirability Scale yang berkisar pada angka -0.35 dan -0.40 untuk sampel mahasiswa (Rotter, 1966). Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen ini adalah *valid* dan dapat dipergunakan untuk mengukur variabel *locus of control* pada penelitian ini.

c. Analisis Korelasi Instrumen Pengukuran Variabel *Fiscal Knowledge*

Hasil analisis korelasi 15 butir pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur variabel *fiscal knowledge* (FK) menunjukkan ada beberapa butir pertanyaan yang tidak memiliki korelasi signifikan dengan total skor *fiscal knowledge* (FKTOT) yaitu pertanyaan nomor 1 ($p\text{-value} = 0,819$), nomor 3 ($p\text{-value} = 0,388$), nomor 6 ($p\text{-value} = 0,872$), nomor 8 ($p\text{-value} = 0,774$), dan nomor 12 ($p\text{-value} = 0,241$), sedangkan pertanyaan nomor 7 memiliki korelasi yang moderat signifikan dengan FKTOT ($p\text{-value} = 0,052$).

Lima pertanyaan yang tidak memiliki korelasi signifikan dengan FKTOT dapat dilihat di Tabel 8. Meskipun 5 pertanyaan tidak memiliki korelasi signifikan dengan FKTOT, namun masih dapat dipergunakan untuk mengukur variabel *fiscal knowledge*. Lima pertanyaan tersebut menguji pengetahuan seseorang tentang pajak mulai dari yang sifatnya umum-administratif (pertanyaan 1, 3, dan 8) maupun yang bersifat teknis (pertanyaan 6 dan 12). Pada saat *pilot test* dilakukan, responden mengakui bahwa 15 pertanyaan pada bagian 3 kuesioner telah mencakup pengetahuan seputar PPh OP mulai dari yang umum sampai yang khusus dan bersifat teknis.

Tabel 8. Lima Pertanyaan Dalam Instrumen *Fiscal Knowledge* Yang Tidak Memiliki Korelasi Signifikan Dengan FKTOT

No.	Pertanyaan
1	NPWP merupakan identitas WP yang wajib dimiliki oleh setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai WP. Untuk memperoleh NPWP, WP dapat mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat
3	Untuk membayar pajak, Wajib Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
6	Penghasilan yang berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak dikenakan Pajak
8	Sepasang suami istri yang menikah dengan perjanjian nikah pisah harta hanya perlu memiliki satu NPWP saja (NPWP suami atau istri).
12	Ketika warisan yang diterima Tuan Adi berupa rumah disewakan kepada pihak lain, maka penghasilan sewa tersebut adalah objek pajak.

3. Uji Reliabilitas

Hasil uji menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* untuk variabel tingkat kepatuhan WP dan variabel *fiscal knowledge* masing-masing adalah 0,752 dan 0,644. Berdasarkan *rules of thumb* George dan Mallery (2003), koefisien Cronbach Alpha tersebut dikategorikan sebagai *Acceptable* ($\alpha = 0,752$) dan *Questionable* ($\alpha = 0,644$) sehingga dapat diolah lebih lanjut.

Analisis Data

Ada 3 variabel yang akan diuji pada penelitian ini, yaitu variabel tingkat kepatuhan WPOP (PTH), *locus of control* (LOC), dan *fiscal knowledge* (FK). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, variabel PTH berupa skor yang berkisar antara 0 sampai dengan 8, variabel LOC berupa skala nominal yang menyatakan orientasi personalitas seseorang apakah *locus*-nya eksternal atau internal, sedangkan variabel FK dinyatakan dalam skala nominal yaitu tinggi atau rendah. Penentuan tinggi atau rendahnya FK seorang responden ditentukan dengan mempergunakan batas 65% artinya bila 65% jawaban bernilai benar, maka responden memiliki FK tinggi dan sebaliknya. Penggunaan batasan 65% ($\alpha = 0,595$) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai reliabilitas (koefisien Cronbach Alpha) tertinggi dibandingkan pilihan batasan yang lain (60% - $\alpha = 0,574$, 70% - $\alpha = 0,589$, dan 80% - $\alpha = 0,569$). Menurut George dan Mallery (2003) koefisien Cronbach Alpha tersebut termasuk dalam kategori *poor but acceptable*.

Hasil uji *homogeneity of variance* dengan Levene Statistic menunjukkan nilai *p-value* > 0,05 yang berarti bahwa seluruh variabel adalah homogen. Namun, dari hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* mengindikasikan adanya distribusi data yang tidak normal yaitu *p-value* < 0,05. Untuk itu dipergunakan uji statistik non-parametrik Kruskal Wallis.

Berbeda dengan ANOVA yang hanya dapat dipergunakan pada data yang berdistribusi normal, statistik non-parametrik Kruskal Wallis dapat dipergunakan pada data yang memiliki skala ordinal dan distribusinya tidak normal. Asumsi

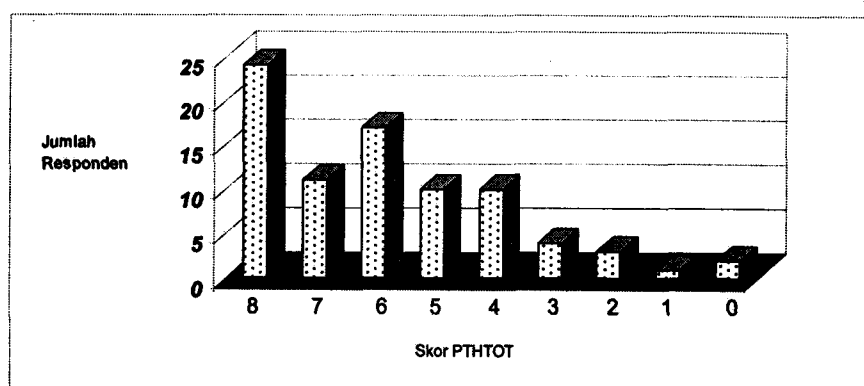
yang mendasari analisis ini adalah sampel yang diambil harus independen (Lind *et al.*, 2008). Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama ingin menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WPOP berdasarkan *fiscal knowledge* yang dimiliki. Hasil analisis non-parametrik Kruskal-Wallis menunjukkan nilai *p-value* 0,389 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol gagal untuk ditolak. Dari hasil analisis terlihat tidak adanya perbedaan sikap pada responden yang memiliki *fiscal knowledge* tinggi maupun rendah. Rekapitulasi kuesioner menunjukkan kecenderungan seluruh responden bersikap patuh.
2. Hipotesis kedua bertujuan menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WPOP berdasarkan *locus of control*. Hasil analisis non-parametrik Kruskal-Wallis menunjukkan nilai *p-value* 0,978 yang berarti nilai ini jauh lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol gagal ditolak. Hasil analisis Kruskal Wallis menunjukkan tidak adanya perbedaan sikap kepatuhan pada responden yang memiliki *locus of control* internal dan eksternal.
3. Hipotesis ketiga bertujuan menguji apakah terdapat interaksi antara *fiscal knowledge* dan *locus of control* dengan tingkat kepatuhan WPOP. Dengan menguji data responden yang memiliki *fiscal knowledge* tinggi saja, hasil analisis non-parametrik Kruskal-Wallis menunjukkan nilai *p-value* 0,325 yang lebih besar dari *level of significance* 0,05. Artinya hipotesis nol gagal ditolak.
4. Hipotesis keempat bertujuan menguji apakah terdapat interaksi antara *fiscal knowledge* dan *locus of control* dengan tingkat kepatuhan WPOP. Dengan menguji data responden yang memiliki *fiscal knowledge* rendah saja, hasil uji statistik non-parametrik Kruskal Wallis menunjukkan nilai *p-value* 0,380 yang lebih besar dari *level of significance* 0,05. Artinya hipotesis nol gagal ditolak.

Pembahasan

Penelitian ini ingin membuktikan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Groenland dan Veldhoven (1983) yang menunjukkan bahwa perilaku penghindaran pajak di Belanda dipengaruhi oleh faktor personalitas *locus of control* dan *fiscal knowledge*. Dengan mempergunakan kuesioner yang dibagikan kepada 150 responden (hanya 82 yang dapat diolah) di Surabaya dan sekitarnya, penelitian ini gagal menolak H_0 untuk keempat hipotesis yang diajukan. Tingkat pengetahuan maupun *locus of control* yang dimiliki tidak memberikan perbedaan pada sikap responden. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Groenland dan Veldhoven (1983) pada sikap wajib pajak di Tilburg. Kegagalan ini disebabkan dominasi sikap patuh pada jawaban responden. Dari 82 sampel yang dapat diolah, 24 responden (29%) menyatakan sikap sangat patuh yang ditunjukkan dengan skor PTH = 8. Sebaliknya, hanya 2 orang responden saja (2%) yang menyatakan sikap sangat tidak patuh yaitu skor PTH = 0. Untuk lebih jelasnya variasi jawaban sikap kepatuhan responden dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada Gambar 1, jawaban responden cenderung berada pada skor > 4 yang berarti patuh, sementara jawaban tidak patuh sangat sedikit jumlahnya. Tidak bervariasinya jawaban ini diduga merupakan salah satu penyebab gagal ditolaknya H_0 .



Gambar 1. Histogram Skor PTHTOT

Bila ditelusuri lebih jauh lagi pada jawaban responden untuk tiap kasus, hampir seluruh responden menjawab patuh untuk kasus 2, kasus 4, dan kasus 6. Kasus 2 dan kasus 4 merupakan pertanyaan terkait kepatuhan teknis, sedangkan kasus 6 terkait dengan kepatuhan administratif. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap kepatuhan antara kepatuhan teknis dan administratif, pengujian Kruskal Wallis juga dilakukan pada masing-masing skor total kepatuhan teknis dan administratif.

Tabel 9. Uji Kruskal-Wallis untuk Variabel *Fiscal Knowledge*

		Jumlah Responden	Mean Rank
PTH ADMIN	FK Rendah	42	39,43
	FK Tinggi	40	43,68
	Total	82	
PTH TEKNIS	FK Rendah	42	40,07
	FK Tinggi	40	43,00
	Total	82	

Test Statistics(a,b)

	PTH ADMIN	PTH TEKNIS
Chi-Square	,756	,338
Df	1	1
Asymp. Sig.	,384	,561

a Kruskal Wallis Test

b Grouping Variable: FK65

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DITINJAU DARI FISCAL KNOWLEDGE, LOCUS OF CONTROL, DAN INTERAKSI ANTARA FISCAL KNOWLEDGE DENGAN LOCUS OF CONTROL OLEH: IKA FRANSISCA

Sebagaimana hasil uji Kruskal Wallis untuk skor total variabel PTH, hasil uji Kruskal Wallis untuk masing-masing kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis juga menunjukkan nilai probabilitas $> 0,05$ yang berarti tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif berdasarkan *locus of control* maupun *fiscal knowledge*.

Tabel 10. Uji Kruskal-Wallis untuk Variabel *Locus of Control*

		Jumlah Responden	Mean Rank
PTH ADMIN	LOC Eksternal	8	22,94
	LOC Internal	34	21,16
	Total	42	
PTH TEKNIS	LOC Eksternal	8	26,25
	LOC Internal	34	20,38
	Total	42	

Test Statistics(a,b)

	PTH ADMIN	PTH TEKNIS
Chi-Square	,154	1,600
Df	1	1
Asymp. Sig.	,695	,206

a Kruskal Wallis Test

b Grouping Variable: LOC

Dari 82 sampel, hanya terdapat 21 responden dengan *locus of control* eksternal, dan hampir seluruhnya menyatakan sikap patuh. Yang menarik adalah 62% dari responden dengan *locus of control* eksternal tersebut memiliki *fiscal knowledge* yang tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Groenland dan Veldhoven (1983) di mana mereka yang *locus of control*-nya eksternal cenderung enggan melakukan penghindaran pajak ketika tingkat pengetahuan pajaknya rendah. Individu dengan *locus of control* internal mendominasi sampel penelitian, yang berarti mereka tidak percaya pada nasib, takdir, dan semacamnya. Sebagian besar (67%) sampel berusia sedang (usia 20-35 tahun) memilih bersikap internal. Fenomena semacam ini didukung banyak penelitian yang menyebutkan *locus of control* seseorang akan cenderung lebih internal pada usia sedang, dan perlahan-lahan menjadi eksternal pada usia yang lebih tua (Heckhausen dan Schultz, 1995; Ryckman dan Malikosi, 1975 dalam Shrestha, 2008).

Ditinjau dari *fiscal knowledge*, responden dengan *fiscal knowledge* tinggi dan rendah tersebar secara merata yaitu 48% responden berpengetahuan pajak tinggi, dan 52% sisanya berpengetahuan pajak rendah. Berdasarkan hasil

rekapitulasi, nampak sebagian besar responden berpengetahuan tinggi memilih bersikap sangat patuh (skor PTH = 8) dan hanya 2 orang yang memiliki skor kepatuhan rendah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Supriyati dan Hidayati (2008) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) mempergunakan WP badan sebagai sampel sedangkan penelitian ini mempergunakan WPOP sebagai sampel yang menyebabkan hasil dua penelitian berbeda.

Penelitian ini menunjukkan kepatuhan responden (WPOP) tidak berbeda antara yang memiliki *fiscal knowledge* tinggi maupun rendah. WPOP memilih bersikap patuh karena takut akan terjadi masalah di kemudian hari, WPOP cenderung memilih melakukan tindakan yang tidak melanggar Undang-Undang, misalnya mencari celah yang ada di setiap peraturan perpajakan. Meskipun gagal mendukung penelitian sebelumnya, penelitian ini berhasil memberikan kontribusi teoritis bagi para mahasiswa dan peneliti serta menyajikan bukti empiris bahwa masih ada WPOP di Surabaya yang mengutamakan bersikap patuh karena takut pada konsekuensi yang dihadapi di kemudian hari. Meskipun WPOP memiliki *fiscal knowledge* rendah, WPOP menyadari pentingnya pajak sebagai salah satu kontribusi bagi anggaran Negara. Sosialisasi tentang pajak di berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, internet, dan sebagainya membuat WPOP mulai membuka diri dan mematuhi peraturan perpajakan.

Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan WPOP berdasarkan *fiscal knowledge* dan *locus of control*, serta untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan WPOP dengan interaksi *fiscal knowledge* dan *locus of control*. Hasil uji menunjukkan bahwa penelitian ini gagal menolak H_0 untuk seluruh hipotesis yang diajukan yang berarti tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan WPOP berdasarkan *fiscal knowledge*, *locus of control*, maupun interaksi keduanya.

Berbedanya hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya disebabkan hampir seluruh responden menyatakan sikap patuh dan sebagian besar memiliki orientasi *locus of control* internal. WPOP di Surabaya memilih bersikap patuh karena takut akan terjadi masalah di kemudian hari, WPOP cenderung memilih melakukan tindakan yang tidak melanggar Undang-Undang, misalnya mencari celah yang ada di setiap peraturan perpajakan. WPOP menyadari pentingnya pajak sebagai salah satu kontribusi bagi anggaran Negara. Sosialisasi tentang pajak di berbagai media membuat WPOP mulai membuka diri dan mematuhi peraturan perpajakan.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan waktu dan biaya menyebabkan penelitian dilakukan hanya di wilayah Surabaya dan sekitarnya, akibatnya hasil penelitian ini tidak dapat

semata-mata digeneralisasi begitu saja. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah yang diteliti, misalnya wilayah Jawa Timur.

Terkait dengan subyek penelitian, responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pegawai, akibatnya jawaban responden kurang bervariasi. Hal ini terjadi karena pegawai umumnya sudah dipotong pajak oleh perusahaan sehingga mereka tidak memiliki cukup pengalaman dalam menghitung pajak dan lebih memilih bersikap patuh. Keterbatasan penelitian juga pada pemilihan sampel yang dilakukan secara berkelompok sehingga mengurangi variasi responden.

Saran untuk penelitian selanjutnya, (1) penelitian selanjutnya dapat membedakan subyek berdasarkan profesinya, misalnya wiraswastawan, dokter, dan sebagainya sehingga dapat diketahui bagaimana perbedaan sikap kepatuhan pajak WP menurut profesi, (2) penelitian selanjutnya sebaiknya membedakan responden menurut usianya agar lebih menunjukkan perbedaan orientasi *locus of control* WPOP, dan (3) pemilihan sampel pada penelitian selanjutnya tidak dilakukan secara berkelompok agar responden yang diperoleh lebih variatif, misalnya dengan mendatangi langsung pusat perbelanjaan atau pusat keramaian.

Daftar Rujukan

- Brodjonegoro, B.P.S. 2009. Orang Bijak Taat Pajak. (Online). (http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9201:orang-bijak-taat-pajak&catid=633:Artikel%20&%20Opini&Itemid=185, diunduh 16 Desember 2009).
- Chaniago, J. 2009. Pemahaman Dasar Statistik Non-Parametrik (Seri 1. Non-Parametrik). (Online) (<http://junaidichaniago.blogspot.com/2009/04/pemahaman-dasar-statistik-non.html>, diunduh 27 Februari 2010).
- Darussalam, D. 2007. Wajah Baru Pelayanan Prima Ditjen Pajak. (Online). (<http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=1240>, diunduh 19 Desember 2009).
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. Account Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Online). (<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/apbn>, diunduh 17 Desember 2009).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2001. *Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta*

- Penguahan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Eriksen, K. dan L. Fallan. 1996. "Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi-Experiment". *Journal of Economic Psychology*. 17: pp. 387-402.
- Formulir SPT 2009 Tidak Dikirim ke WP, *Jawa Pos*, 16 Desember 2009.
- Gliem, J. A. dan R. R. Gliem. 2003. "Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach's Alpha Reliability Coefficient for Likert-type Scales", Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education. (Online). (<http://www.alumni-osu.org/midwest/midwest%20papers/Gliem%20&%20Gliem--Done.pdf>, diunduh 25 Februari 2010).
- Groenland E.A.G dan G.M.V. Veldhoven. 1983. "Tax Evasion Behavior". *Journal of Economic Psychology*. 3: pp. 129-144.
- Hanno. M. D. dan G. R. Violette. 1996. "An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior". *Behavioral Research in Accounting*. 8: pp. 57-75.
- Hornby, A. S. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- <http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen>.
- Indriantoro, N. 1993. "The Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction with Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating Variables". Disertasi Doktorat tidak dipublikasikan. University of Kentucky.
- Jackson, B. dan V. Milliron. 1986. "Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects". *Journal of Accounting Literature*. 5: pp. 125-165.
- Lind, D. A., W. G. Marchal, dan S. A. Wathen. 2008. *Statistical Techniques in Business and Economics: With Global Data Sets Thirteenth Edition*. New York: McGraw Hill.
- Mearns, J. 2009, The Social Learning Theory of Julian B. Rotter. (Online). (<http://psych.fullerton.edu/jmearns/rotter.htm>, diunduh 23 Agustus 2009).
- Melsen, A.G.M.V. 1985. *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, W. 2008. "Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia)". *Jurnal Keuangan Publik*. 5 (1): hal. 85-137.
- Shrestha, S. 2008. "A Study on Locus of Control Among Adolescents Living in Joint and Nuclear Families", BA III Year Term Paper Adolescents Psychology (Psy 305). (Online). (<http://www.scribd.com/doc/9129906/Locus-of-Control-Term-Paper-2008>, diunduh 18 Maret 2010).
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyati, dan N. Hidayati. 2008. "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. 7: hal. 41-50.

- Rotter, J.B. 1954. "Social Learning and Clinical Psychology, dalam Rotter, J. B. (ed.)", *The Development and Applications of Social Learning Theory: Selected Papers*. New York: Praeger Publishers.
- _____. 1966. "Generalized Expectancies for Internal versus External Control of Reinforcement, dalam Rotter, J. B. (ed.), *The Development and Applications of Social Learning Theory: Selected Papers*. New York: Praeger Publishers.
- _____. 1982. *The Development and Applications of Social Learning Theory: Selected Papers*, New York: Praeger Publishers.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wisnuharjantho. 2008. *Saatnya Proaktif Memberantas Buta Pajak*. (Online). (<http://wisnuharjantho.wordpress.com/2008/02/05/saatnya-proaktif-memberantas-buta-pajak>, diunduh 5 September 2009).